

RENSTRA RENCANA STRATEGIS 2020-2024



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PERKEBUNAN
Jl. Cut Nyak Dhien No. 6 Pekanbaru

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

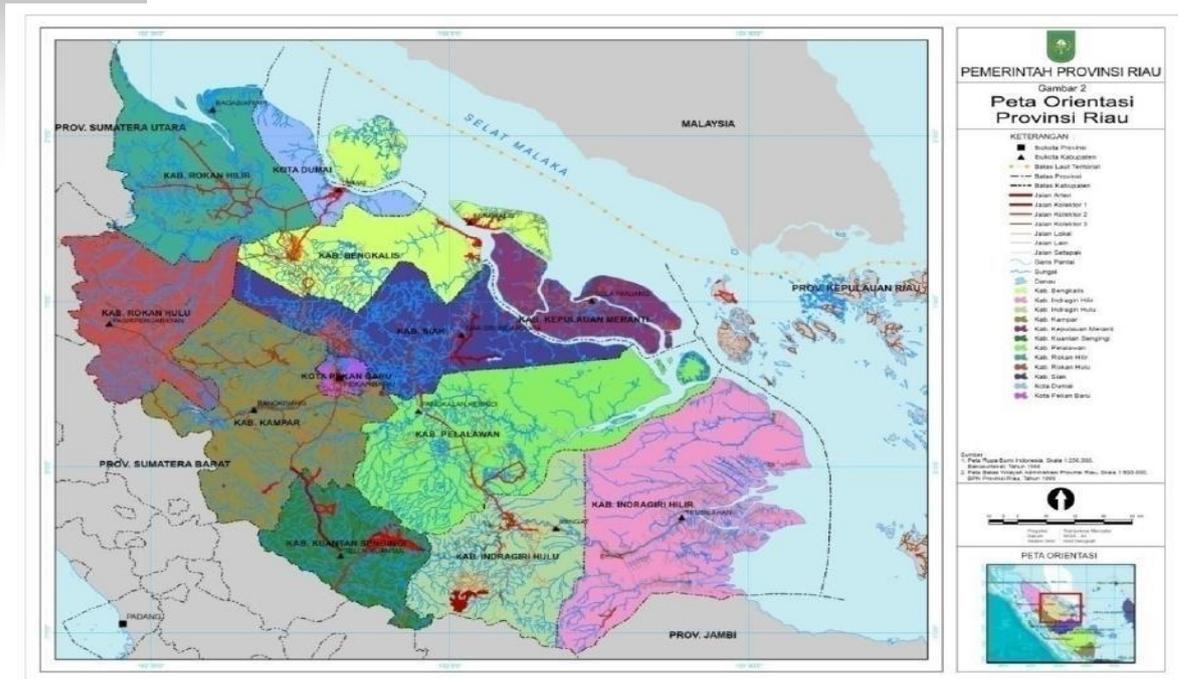
Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik masa kini maupun masa yang akan datang karena terletak pada wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Keberadaan wilayah Provinsi Riau terletak antara 01°05'00" Lintang Selatan sampai 02°25'00" Lintang Utara dan 100°00'00" sampai 105°05'00" Bujur Timur berbatasan langsung dengan 4 Provinsi lainnya yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara.
- ✓ Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat.
- ✓ Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
- ✓ Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

Provinsi Riau memiliki luas $\pm 90.128,76 \text{ Km}^2$, terdiri dari luas daratan $89.083,57 \text{ Km}^2$ (98,8 %) dan luas lautan/perairan $1.045,19 \text{ Km}^2$ (1,2%). Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota. Kesepuluh Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti. Dua Kota adalah Kota Pekanbaru dan Dumai.

Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Riau berada pada posisi strategis yang mempunyai arti penting dalam geopolitik dan perekonomian nasional dan regional. Beberapa keuntungan yang diperoleh berdasarkan letak geografis tersebut adalah berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka, dekat dengan Malaysia, Singapura, selain itu berada di segitiga pertumbuhan ekonomi tiga negara Indonesia, Malaysia dan Thailand. Peta Provinsi Riau disajikan pada Gambar I.1.



Gambar I.1. Peta Provinsi Riau

Pembangunan perkebunan merupakan bagian dari pembangunan nasional dan daerah. Sejak dulu hingga sekarang sub sektor perkebunan memegang peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional dan daerah. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui penyediaan bahan pangan, penyediaan bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, pencapaian PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), sumber devisa negara, sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat perdesaan, dan pelestarian lingkungan. Peran ini akan bertambah di masa yang akan datang dengan berkembangnya teknologi dan berkurangnya sumberdaya tak terbarukan, terutama dalam hal penyediaan pangan dan energi. Sesuai kondisi kesuburan tanah, jenis lahan dan kesesuaian lahan serta sosial budaya, maka sebagian besar lahan non kawasan hutan khususnya lahan budidaya, umumnya diusahakan untuk budidaya tanaman perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura.

Provinsi Riau memiliki potensi untuk pengembangan perkebunan dalam rangka percepatan akses untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi dan menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Provinsi Riau. Sebagian besar angkatan kerja penduduk Provinsi Riau berusaha dan bekerja pada sektor pertanian dalam arti yang luas dengan rata-rata sebesar 34,57% pada tahun 2018. Sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang RTRW Provinsi Riau, penggunaan lahan untuk sub sektor perkebunan seluas 2.602.746,47 hektar atau 28,87% dan lahan untuk pertanian seluas 514.130,01 hektar atau 5,7% dari total penggunaan lahan seluas 9.012.875,96 hektar.

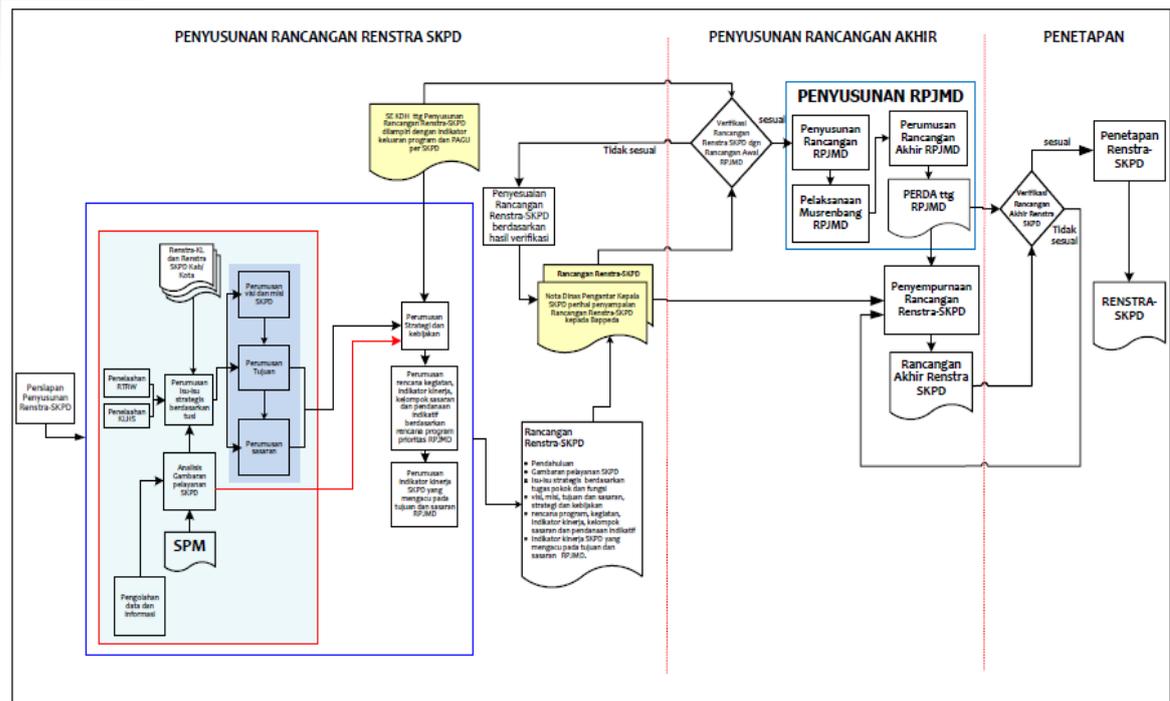
Pengembangan komoditas perkebunan di Provinsi Riau belum optimal. Berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangannya, antara lain permasalahan dari aspek teknis berupa: (1) luas tanam dan luas panen tanaman perkebunan yang semakin menurun akibat bertambahnya tanaman tua dan rusak; (2) rendahnya produktivitas tanaman perkebunan; (3) kondisi sarana dan prasarana belum memadai; (4) penerapan teknologi perkebunan masih rendah; (5) Belum tertibnya permasalahan perizinan usaha perkebunan; (6) industri hilir perkebunan dan pemasarannya masih terbatas; dan (7) masih perlunya pendampingan dalam merubah sikap, perilaku dan keterampilan petani. Permasalahan lainnya juga ditemukan antara lain keterbatasan aksesibilitas terhadap sumber permodalan dan kapasitas sumberdaya manusia petani yang masih rendah.

Dalam situasi dan kondisi seperti ini, pembangunan perkebunan masih tetap penting untuk dilanjutkan secara berkesinambungan dalam rangka pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah: 1) potensi sumber daya yang besar dan beragam, 2) banyaknya penduduk yang bergantung pada sektor ini, 3) peluang pasar yang sangat terbuka, dan 4) berpotensi besar dalam memberikan kontribusi PDRB.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas diperlukan perencanaan pembangunan sub sektor perkebunan yang terarah, terpadu, dan bersinergi antar sub sektor/sektor terkait, dengan tetap mempedomani dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D) Tahun 2015-2019, dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 - 2019 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang selaras dengan visi, misi, strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bagan alir tahapan penyusunan Renstra Satuan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Bagan I.2 berikut ini :



Gambar 1.2. Bagan Alir Penyusunan Renstra OPD Provinsi

Penyusunan Restra dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program yang ditetapkan, serta memperhatikan keselarasan program Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait dengan menghimpun usulan dari kabupaten/kota di dalam proses perencanaan pembangunan perkebunan. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, telah dilalui tahapan dan mekanisme perencanaan tingkat daerah seperti Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Forum SKPD Provinsi Riau, dan tahapan Musrenbang Daerah guna merumuskan perencanaan yang akan datang. Rencana pembangunan perkebunan yang akan datang sebagaimana dimaksudkan di atas, pelaksanaannya direncanakan selama 5 (Lima) tahun yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020 -2024.

I.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020 -2024 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 9) Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

- 11) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
- 12) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
- 13) Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.
- 14) Peraturan Gubernur Riau No. ... Tahun ... tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

➤ MAKSUD

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024, yaitu:

- a) Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pada subsektor perkebunan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan disesuaikan dengan perkembangan terbaru program dan target kegiatan;
- b) Merupakan dokumen perencanaan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam mendukung Pembangunan Daerah Provinsi Riau;
- c) Mempermudah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan perkebunan.

➤ TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024, yaitu:

- a) Menentukan arah dan menjadi acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan perkebunan di Provinsi Riau
- b) Mewujudkan visi dan misi Gubernur Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

Bab ini memuat informasi tentang peran tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas mengenai sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

Pada bab ini diulas tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Riau, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dijelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan tentang indikator kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau.

BAB VIII. PENUTUP

Tabel 2.3 (TABEL. T - C.23)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Kondisi Kinerja pada	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
						2016	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018
1	Perkebunan																			
	- Kelapa Sawit (ton)	-	-	-	7.841.947	3.957,00*	4.390,00*	7.762.159	7.950.267	8.150.267	3.752,00*	3.789,52*	7.458.298	7.464.773	-	94,82	86,32	96,1	93,9	-
	- Kelapa (ton)	-	-	-	421.465	1.301,60*	1.314,62*	416.212	427.023	437.023	1.290,50*	1.303,41*	390.899	392.330	-	99,15	99,15	93,9	91,9	-
	- Karet (ton)	-	-	-	374.900	1.062,58*	1.073,21*	363.734	371.921	381.950	1.122,00*	1.133,22*	355.909	359.428	-	105,6	105,6	97,8	96,6	-
	- Sagu (ton)				366.032	269.786	318.347	326.755	333.093	343.093	366.032	373.353	339.067	373.007	-	135,7	117,28	104	112,0	-
2	Persentase peningkatan nilai tambah																			
	Tanaman Perkebunan	-	-	-	-			1,50	1,70	2,00	-	1,01	1,21	-			67,33	71,18	-	

Ket : * dalam satuan kg/ ha/ tahun

Dengan adanya penggabungan Dinas Perkebunan Provinsi Riau menjadi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada tahun 2017, maka dilakukan review terhadap Rencana Strategis. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 (T-C 23), dimana terdapat perubahan target dan indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau khususnya komoditi Perkebunan yang diselaraskan juga dengan Program Nasional. Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2018 yakni :

a. Komoditi Perkebunan

- Indikator kinerja komoditi perkebunan adalah produksi dimana untuk komoditi kelapa sawit, karet dan kelapa capaian kinerja mencapai lebih kurang dari 95 %, sedangkan komoditi sagu 112 % melebihi target yang ditetapkan. Permasalahan yang dihadapi pada komoditi kelapa sawit antara lain, penggunaan bibit palsu (bibit yang tidak bersertifikat dan tidak bermutu), perubahan harga jual TBS dan perubahan iklim (kemarau) yang mengakibatkan kebakaran lahan perkebunan.
- Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target produksi kelapa adalah tanaman tidak dipanen oleh petani disebabkan harga jual yang rendah. Petani merasa rugi karena ongkos panen lebih tinggi dari harga jual. Selain itu juga tanaman kelapa banyak yang sudah tua dan rusak yang sangat berpengaruh pada produksi dan produktivitas.
- Sedangkan permasalahan pada tanaman karet adalah tanaman sudah banyak yang tua dan rusak akibat kurangnya perawatan, sehingga sangat mempengaruhi jumlah produktivitas tanaman karet (ojol). Disamping itu alih fungsi ke komoditi lain dan alih fungsi lahan juga .
- Permasalahan pada tanaman sagu dikarenakan belum adanya bibit yang bersertifikat / bibit unggul seperti tanaman kelapa sawit / karet yang mempunyai produktivitas tinggi sehingga petani menanam tanaman sagu dari hasil anakan tanaman sagu disekitar kebun.

b. Peningkatan Nilai Tambah

Usaha untuk meningkatkan nilai tambah produk komoditi tanaman perkebunan melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian, alat pasca panen maupun promosi yang dibandingkan dengan jumlah kelompok tani yang terdaftar di Provinsi Riau masih berjalan secara maksimal. Adapun capaian kinerja untuk peningkatan nilai tambah baru kategori sedang atau lebih kurang 70 %. Sementara itu manfaat kegiatan budidaya pertanian belum memberikan porsi yang besar bagi pendapatan petani. Hal ini selain disebabkan karena produktifitas petani rendah, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal petani seperti fluktuasi harga, perubahan harga sarana produksi pertanian dan mekanisme pemasaran.

Tabel 2.4 (TABEL. T - C .24)

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun					Rata-rata pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	18.278.473.086	17.568.138.000	61.896.936.154,98	60.597.529.890	57.550.769.755,23	16.472.400.046	16.117.385.525,00	51.918.048.957	52.380.253.637	-	90,12	91,74	83,88	86,51	-	-3,57	0,89
Belanja Langsung	19.398.033.000	80.286.325.395	81.747.161.805,00	66.387.208.850	35.826.141.353,00	11.709.227.846	57.375.081.343,00	66.152.928.545	33.976.948.232	-	60,36	71,46	80,92	51,18	-	-33,80	-48,64
APBN Dekonsentrasi	8.071.826.000	3.562.501.000	24.905.008.000,00	16.270.248.000	16.172.502.000,00	7.526.491.220	3.528.569.870,00	21.040.349.150	15.213.791.092	-	93,24	99,05	84,48	93,51	-	-19,42	-27,69
APBN TP	31.715.438.000	3.839.727.000	130.431.579.000,00	89.350.548.000	73.272.921.000,00	29.660.126.295	3.534.634.745,00	96.431.962.832	82.266.271.108	-	93,52	92,05	73,93	92,07	-	-25,05	-14,69

Dari Tabel 2.4 (Tabel.T.C.24), dapat diketahui bahwa realisasi dan anggaran APBD dan APBN Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang kemudian menjadi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau periode tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

- Pada belanja tidak langsung terjadi perubahan yang cukup signifikan dimana adanya perubahan terhadap jumlah PNS (Pegawai pensiun dan Pegawai mutasi) dan perubahan terhadap besar tunjangan pegawai. Namun dilihat dari Rasio antara realisasi dan pagu anggaran belanja tidak langsung tahun 2018 cukup baik yakni 86,51.
- Sedangkan belanja langsung pada tahun 2018 terdapat efisiensi anggaran (Rasionalisasi) yang cukup besar dari Rp. 66.387.208.850 menjadi Rp. 33.976.948.232,-. Adapun capaian serapan anggaran antara realisasi dan pagu anggaran murni hanya mencapai 51,18 %. Namun jika dilihat dari pagu rasionalisasi, capaian kinerja adalah sebesar 82,19 % dan pelaksanaan fisik sesuai dengan progres yang telah ditetapkan.
- Rasio antara realisasi dan anggaran untuk Dana APBN Dekonsentrasi sangat tinggi mencapai 93,51, sisanya merupakan efisiensi atau sisa kontrak. Sedangkan rata-rata pertumbuhan anggaran APBN Dekonsentrasi sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan dimana penurunan yang cukup besar terjadi pada tahun 2018.
- Dana APBN Tugas Pembantuan, capaian terhadap Rasio antara realisasi dan pagu anggaran adalah cukup baik dimana pada tahun 2018 mencapai 92,07 sisa anggaran merupakan sisa kontrak, sedangkan rata-rata pertumbuhannya mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar -25,05.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Kinerja pembangunan perkebunan secara nasional selama 3 tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Indikator ekonomi makro seperti pendapatan domestik bruto, neraca perdagangan, dan penyerapan tenaga kerja rakyat menunjukkan trend positif.

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang disesuaikan dengan potensi wilayah maka arahan pengembangan tanaman perkebunan untuk pembangunan tahun ke depan lebih difokuskan pada optimasi penggunaan lahan dan memanfaatkan inovasi teknologi.

Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan masih diperlukan sinergi terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan perkebunan menjadi salah satu ujung tombak penciptaan *green economy* yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup. Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan. Dalam KLHS terdapat 6 aspek kajian, yaitu:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam (SDA);
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keragaman hayati.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan tanaman perkebunan terkait dengan 6 aspek tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Karakteristik lahan, kondisi fisik kimia tanah, ketersediaan dan suplai air, aspek topografi, geomorfologi, pola hidrologi maupun aksesibilitas menjadi faktor yang perlu diperhitungkan untuk merancang kawasan.
2. Penanganan budidaya dan produksi serta tata kelola teknologi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Penanganan pasca panen dan aplikasi teknologi pasca panen yang ramah lingkungan jika tidak diterapkan akan berdampak pada menurunnya mutu, rendahnya nilai jual, turunnya nilai kompetitif
4. Layanan pengaturan ekosistem melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan pengaturan pola tanam
5. Layanan kultural melalui aplikasi pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola SDA
6. Penggunaan lahan sesuai dengan jenis peruntukan lahan, potensi SDA yang tersedia dan SDM yang terlibat
7. Efisiensi dalam pengadaan produk pendukung (pupuk, pestisida, benih), teknologi infrastruktur pendukung (alat/mekanisasi), SDA pendukung (air, media tanah) yang akan diterapkan

8. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan perkebunan akan membentuk ekosistem buatan, terjadinya perubahan ekosistem alami secara terus menerus berdampak pada meningkatnya kerentanan ekosistem, dan kondisi ini mempengaruhi tingkat adaptasi terhadap perubahan iklim.
9. Pola budidaya monokultur ditinjau dari aspek keseimbangan ekosistem akan mengancam keanekaragaman hayati.

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra K/L , Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS, tidak semuanya dapat dikerjakan dan hasilnya mencapai target yang telah ditetapkan, terutama dalam hal pencapaian peningkatan luas tanam, luas panen, jumlah produksi dan produktifitas tanaman perkebunan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan Dinas Perkebunan berbagai tantangan dan peluang sebagai berikut :

➤ **Tantangan**

- a) Semakin tingginya alih fungsi lahan
- b) Menurunnya kesuburan tanah pertanian
- c) Kondisi jaringan irigasi tidak memadai
- d) Anomali iklim
- e) Mahalnya agro input (sarana produksi dan alat pertanian)
- f) Terbatasnya modal petani
- g) Penerapan teknologi terbatas
- h) Daya saing produksi masih rendah
- i) Tingkat kehilangan hasil masih tinggi
- j) Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang masih rendah
- k) Kurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana produksi
- l) Isu lingkungan hidup dan globalisasi
- m) Kesejahteraan petani/pekebun masih rendah (NTP < 100)

➤ **Peluang**

- a) Tersedianya SDA (Sumber Daya Alam), SDM (Sumber Daya Manusia), SDB (Sumber Daya Buatan) dalam pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- b) Posisi wilayah Riau yang strategis dalam menjangkau daerah-daerah pemasaran baik nasional dan internasional
- c) Pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terbuka luas
- d) Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan membaik di Provinsi Riau
- e) Kebijakan pemerintah yang sangat mendukung

- f) Banyaknya sektor swasta tumbuh dan berkembang di Provinsi Riau
- g) Infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, komunikasi) semakin baik
- h) Potensi sumberdaya perkebunan masih dapat ditingkatkan untuk pengembangan industri hilir (bioindustri dan bioenergi)
- i) Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri
- j) Iklim investasi terhadap produk perkebunan kondusif
- k) Meningkatnya kebutuhan terhadap bahan pangan
- l) Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim sudah menjadi komitmen pemerintah

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu strategis adalah kebijakan fundamental atau prioritas program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa mendatang. Isu-isu dapat juga diartikan sebagai persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu mendatang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perkebunan maka indikator program yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya produksi tanaman utama (kelapa sawit, kelapa, karet, sagu)
2. Meningkatnya produktivitas tanaman utama (kelapa sawit, kelapa, karet, sagu)
3. Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia (aparatur dan petani)

Beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja program tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek yakni :

3.1.1. Aspek Teknis

1) Luas tanaman tua dan rusak semakin bertambah

Potensi luas perkebunan di Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.1. Dari luas perkebunan terdapat luas komoditas tanaman perkebunan tanaman tua dan rusak (TTR) dari total luas perkebunan di Provinsi Riau sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2. Terdapat TTR yang berkurang pada tahun berikutnya adalah karena dua kemungkinan, pertama telah dilakukan peremajaan kembali, dan kedua atau telah dikonversi tanamannya berubah menjadi tanaman jenis lainnya.

Tabel 3.1. Luas Perkebunan di Provinsi Riau Tahun 2014-2018

No	Komoditi	Luas (Ha)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Karet	502.906	501.787	491.025	486.367	487.736
2	Kelapa	516.895	515.167	510.949	422.181	422.594
3	Kelapa Sawit	2.411.820	2.424.544	2.423.761	2.452.141	2.489.957
4	Kakao	6.368	6.325	6.581	6.323	6.324
5	Kopi	4.713	4.641	4.512	4.528	4.769
6	Sagu	83.513	83.691	72.445	73.588	74.157
7	Pinang	19.145	19.156	19.493	19.514	19.521
8	Gambir	4.824	4.846	4.846	4.682	4.680
9	Enau	22	23	23	17	217
10	Lada	5	5	5	1	0.60
Jumlah		3.550.211	3.560.185	3.533.640	3.469.342	3.509.956

Tabel 3.2. Data Tanaman Tua dan Rusak (TTR) Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014-2018

No	Komoditi	Luas (Ha)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Karet	88.481	7.715	85.039	83.650	82.124
2	Kelapa	114.772	114.045	114.812	74.437	73.653
3	Kelapa Sawit	44.618	41.208	40.363	40.300	36.002
4	Kakao	918	905	447	513	503
5	Kopi	929	779	774	851	845
6	Sagu	8.050	8.413	4.069	4.060	4.063
7	Pinang	3.619	3.644	3.627	3.731	3.746
8	Gambir	663	663	677	883	883
9	Enau	8	8	8	2	2
Jumlah		262.058	257.380	249.816	208.427	201.821

2) Masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan

Produksi perkebunan di Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.3. Produktivitas tanaman perkebunan di Provinsi Riau masih rendah, terbagi menurut produktivitas kebun rakyat dan produktivitas kebun perusahaan yang disajikan pada Tabel 3.4

Tabel 3.3. Produksi Perkebunan di Provinsi Riau Tahun 2014-2018

No	Komoditi	Produksi (Ton)					Keterangan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Karet	367.261	374.900	363.734	355.909	373.749	SIR
2	Kelapa	421.654	421.465	416.212	390.899	392.701	Kopra
3	Kelapa Sawit	7.561.293	7.841.947	7.762.159	7.458.298	7.683.535	CPO
4	Kakao	1.437	1.640	2.877	2.981	2.906	Biji Kering
5	Kopi	2.465	2.843	2.853	2.855	3.029	Biji kering
6	Sagu	340.196	366.032	326.755	330.046	364.233	Tepung
7	Pinang	8.597	9.825	10.052	10.493	10.536	Biji kering
8	Gambir	4.022	2.770	2.771	2.772	2.772	Berat kering
9	Enau	22	22	19	21	21	Gula kering
10	Lada	1	1	1	0	0.04	Biji kering
Jumlah		8.706.948	9.021.445	8.887.433	8.554.274	8.833.482	

Tabel 3.4. Produktivitas Perkebunan Rakyat dan Perusahaan

No	Komoditi	Satuan	Rata-rata Produktivitas Tahun 2014-2018	Potensi Produktivitas Baku Teknis	Keterangan
1.	Karet : - Karet rakyat - Karet perusahaan	Ton SIR/ha	1,12 1,71	2 - 3	Malaysia 1,3 Thailand 1,9
2.	Kelapa : - Kelapa rakyat - Kelapa perusahaan	Ton kopra/ha	1,15 1,44	2,5-3,5	
3.	Kelapa sawit : - Kelapa sawit rakyat - Kelapa sawit perusahaan	Ton CPO/ha	3,27 3,70	4-6	Malaysi 4,5
4.	Sagu : - Sagu rakyat - Sagu perusahaan	Ton/ha	6,71 9,10	14-26	

Rendahnya produktivitas akan berpengaruh pada produksi tanaman. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas perkebunan, yaitu sebagai berikut :

- a. Kebun dengan kondisi tanaman tua dan rusak (TTR) cukup luas;
- b. Belum optimalnya penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat
- c. Belum terpenuhinya standar sarana produksi lainnya;
- d. Belum terpenuhinya standar populasi tanaman per hektar;
- e. Pengendalian OPT belum dilakukan secara terpadu dan ramah lingkungan;
- f. Adanya gangguan usaha dan konflik perkebunan;
- g. Dukungan penerapan teknologi budidaya yang rendah;
- h. Terbatasnya SDM petani dan petugas lapangan;
- i. Budaya dan perilaku petani lokal yang tidak kompetitif;
- j. Perubahan iklim.

3) Kondisi Sarana dan Parasarana belum memadai

Kondisi sebagian sarana dan prasarana perkebunan juga masih jauh dari yang diharapkan, baik berupa alat mesin pertanian maupun sarana pengairan serta jalan produksi kebun. Pada beberapa daerah hilir (Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, dan Kepulauan Meranti) mengalami kerusakan tanggul, saluran dan pintu klep (trio tata air), sehingga menyebabkan intrusi air laut. Masuknya air laut menyebabkan sifat fisik, kimia dan biologi tanah rusak, dan menyebabkan pertanian dan perkebunan rusak, tidak dapat tumbuh dengan baik. Beberapa daerah pesisir selain mengalami intrusi air laut juga abrasi, yaitu kehilangan wilayah daratan akibat tergerus ombak air laut. Kondisi jalan produksi di perkebunan dengan tanah mineral juga belum memadai sehingga menyebabkan ongkos angkut hasil panen perkebunan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi.

4) Penerapan teknologi pertanian masih rendah

Penerapan teknologi baik teknologi budidaya maupun panen dan pasca panen juga masih rendah, secara keseluruhan baru sekitar 60% dari anjuran yang ditetapkan. Penggunaan benih bermutu, pola dan jarak tanam, pengendalian Hama penyakit serta pemupukan juga masih rendah.

5) Ketersediaan dan pemanfaatan lahan

Peningkatan jumlah penduduk yang pesat dan distribusinya yang tidak merata mengakibatkan daya dukung lahan terlampaui. Kondisi demikian menimbulkan terjadinya

kompetisi pemanfaatan yang kurang sehat bagi kepentingan multi sektoral yang seringkali menjadi pemicu terjadinya kasus gangguan usaha perkebunan. Berdasarkan data pada Tabel 3.1, maka total luas perkebunan di Provinsi Riau tahun 2018 adalah 3.520.775 ha. Berdasarkan peta pola ruang RTRW Provinsi Riau sesuai Perda No. 10 Tahun 2018, alokasi untuk perkebunan hanya 2.602.746,47 ha, terdiri dari Perkebunan Besar seluas 1.632.242,78 ha dan Perkebunan Rakyat seluas 970.503,70 ha, dengan demikian terdapat selisih seluas 918.028,53 ha. Berkaitan dengan hal ini maka perlu dilakukan inventarisasi, identifikasi dan verifikasi luas perkebunan di Provinsi Riau.

Status perizinan perkebunan di Provinsi Riau mendapat pengawasan dari Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu termasuk dalam provinsi yang menjadi pilot project Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). Telah dilakukan monitoring evaluasi perizinan perkebunan secara intensif tiap tiga bulan, dan status perizinan Izin Lokasi (ILOK) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) sampai dengan bulan Oktober 2019 disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Status Data Perizinan Perkebunan di Provinsi Riau dalam Stranas KPK

No.	Kabupaten/ Kota	Data diterima Provinsi						Keterangan
		Data SK		Lampiran Peta SK		Peta Shapefile		
		ILOK	IUP	ILOK	IUP	ILOK	IUP	
1	Indragiri Hulu	39	35	33	25	4	9	*)
2	Rokan Hilir	32	13	27	1	7	0	
3	Indragiri Hilir	35	33	29	6	22	9	
4	Bengkalis	22	19	18	0	15	0	
5	Pelalawan	56	50	40	20	0	0	
6	Kampar	45	64	26	31	10	27	
7	Rokan Hulu	83	49	75	40	56	49	
8	Siak	29	23	19	0	11	0	
9	Kuantan Singingi	27	30	20	5	0	0	
10	Pekanbaru	8	6	6	0	0	0	
11	Dumai	0	2	0	0	0	0	
12	Kepulauan Meranti	0	0	0	0	0	0	Komoditi Sagu
TOTAL		341	286	267	123	125	94	

Keterangan *) Data SK telah ada, namun belum lengkap; Data Peta telah ada, namun belum Lengkap, dan data peta belum seluruhnya dibuat dalam bentuk file shp.

Semua data perizinan perkebunan seyogyanya harus lengkap terdapat Surat Keputusan pemberi izin baik dari Ditjen Perkebunan, Gubernur, maupun Bupati/Walikota sesuai

kewenangannya, dengan didukung Izin Lokasi pada awalnya, kesemuanya harus dilengkapi dengan lampiran SKnya dan peta dalam bentuk shapefile.

Berdasarkan pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan hasil mengikuti rapat dan pertemuan di tingkat Kementerian Pertanian, maka dapat dilakukan identifikasi jenis gangguan usaha dan konflik perkebunan, yang dibagi dalam 2 (dua) golongan sengketa, yaitu sengketa lahan dan sengketa non lahan. Sengketa lahan adalah sengketa dan/atau konflik perkebunan yang berkaitan langsung dengan lahan, terdapat 20 jenis sengketa lahan yaitu :

1. Penerbitan Izin Usaha Perkebunan yang belum/tidak sesuai ketentuan ;
2. Pembangunan kebun melebihi luas areal perizinan;
3. Penggunaan tanah adat/ulayat tanpa persetujuan pemuka adat/masyarakat;
4. Penetapan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di Kabupaten/Kota belum selesai;
5. Okupasi/penyerobotan lahan oleh masyarakat;
6. Tumpang tindih lahan antara perkebunan dengan kawasan hutan;
7. Tumpang tindih lahan perkebunan dengan kawasan pertambangan;
8. Tumpang tindih lahan karena izin baru;
9. Proses penerbitan HGU tidak mengikuti ketentuan yang berlaku;
10. Tuntutan pengembalian lahan masyarakat terhadap tanah dalam proses perpanjangan HGU;
11. Ganti rugi lahan dan tanam tumbuh belum selesai tetapi perusahaan sudah operasional;
12. Tanah masyarakat diambil alih perusahaan;
13. Kebun plasma yang menjadi agunan kredit diperjualbelikan oleh petani tanpa sepengetahuan perusahaan/bank;
14. Tuntutan masyarakat terhadap kebun plasma yang telah dijanjikan tidak dipenuhi perusahaan;
15. Masyarakat menuntut pengembalian tanah yang sudah dilakukan ganti rugi oleh perusahaan;
16. Izin Lokasi sudah berakhir dan tidak dilakukan pembaharuan/ perpanjangan;
17. Masyarakat menuntut lahan perusahaan untuk dimiliki/dikuasai;
18. Luas lahan plasma tidak sesuai dengan penetapan jumlah calon petani peserta oleh Bupati;
19. Tuntutan masyarakat atas pembangunan kebun plasma minimal 20 % dari areal yang diusahakan oleh perusahaan;
20. Lahan yang ditelantarkan oleh perusahaan.

Sengketa non lahan adalah merupakan sengketa dan/atau konflik perkebunan yang tidak berkaitan secara langsung dengan lahan, terbagi dalam 10 jenis sengketa, yaitu :

1. Petani tidak mampu dan atau tidak ada keinginan membayar/melunasi kredit ke perusahaan atau perbankan;
2. Penetapan harga pembelian produksi kebun plasma tidak sesuai ketentuan;
3. Masyarakat menolak pembangunan Perkebunan atau Pabrik Kelapa Sawit karena dipengaruhi oleh LSM dan pihak ketiga lainnya (oknum);
4. Penetapan batas kredit kebun plasma tidak sesuai ketentuan;
5. Penjarahan dan pencurian produksi;
6. Petani ingin ikut sebagai peserta plasma;
7. Keterlambatan konversi kebun plasma;
8. Perusahaan tidak secara rutin menyampaikan informasi sisa hutang kepada petani;
9. Pelaku usaha perkebunan tidak memiliki perizinan usaha perkebunan;
10. Wanprestasi/ingkar janji kemitraan perusahaan dengan masyarakat;

Konflik perkebunan dapat berakibat pada menurunnya produksi perkebunan. Mengingat tingginya konflik di perkebunan maka perlu dilakukan usaha penanggulangan gangguan usaha perkebunan, baik intern dinas maupun berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait.

6) Industri hilir pertanian dan pemasarannya masih terbatas

Selain produk kelapa sawit dan kelapa yang telah diusahakan oleh industri perkebunan besar, kondisi industri hilir dari komoditas karet, kakao, kopi, dan sagu masih sangat terbatas, baru berkembang pada skala kecil di tingkat rumah tangga. Sebagian besar ekspor yang dilakukan baru berupa bahan mentah. Untuk itu pengolahan komoditas perkebunan menjadi penting agar memberikan nilai tambah pada suatu produk, membuka peluang tenaga kerja dan memperluas serapan pasar terhadap komoditas.

Industri Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) saat ini berjumlah 227 unit, pabrik pengolahan karet berjumlah 12 unit dan pabrik pengolahan kelapa 18 unit. Potensi pengolahan produk dari pohon kelapa yang bisa dilaksanakan oleh petani skala rumah tangga dengan membentuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yaitu dari air kelapa (28%) adalah dibuat nata de coco, kecap, cuka dan minuman. Dari tempurung (16%) dibuat arang batok, tepung arang, arang aktif, dan barang kerajinan alat rumah tangga berupa gayung dan sendok sayur. Dari sabut kelapa (20%) dapat dibuat keset, karpet, tali dan matras, sedangkan dari lidi (5%) dibuat sapu lidi, aneka keranjang dan piring. Hal ini berlaku juga untuk produk turunan karet, kakao, sagu dan kopi. Jumlah PKS di Provinsi Riau sampai dengan Desember 2018 disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Jumlah Pabrik Kelapa Sawit di Provinsi Riau per Desember 2018

No	Kabupaten/Kota	PKS Kebun		PKS Non Kebun		Total	
		Jumlah	Kapasitas (Ton TBS/jam)	Jumlah	Kapasitas (Ton TBS/jam)	Jumlah	Kapasitas (Ton TBS/jam)
1	Indragiri Hulu	13	555	11	465	24	1.020
2	Rokan Hilir	15	755	22	780	37	1.535
3	Indragiri Hilir	24	1.200	5	150	29	1.350
4	Bengkalis	7	425	10	330	17	755
5	Pelalawan	26	1.285	9	385	35	1.670
6	Kampar	24	1.240	13	560	37	1.800
7	Rokan Hulu	22	1.155	16	510	38	1.665
8	Siak	11	505	18	790	29	1.295
9	Kuantan Singingi	17	780	5	225	22	1.005
10	Pekanbaru	2	75	0	0	2	75
11	Dumai	0	0	2	120	2	120
12	Kepulauan Meranti	0	0	0	0	0	0
TOTAL		161	7.975	111	4.315	272	12.290

Tingkat pertambahan nilai dari komoditas perkebunan sebagai produk utama baik dari segi mutu maupun jenis yang masih rendah karena belum tersedia sarana dan prasarana pendukung. Oleh karenanya perlu dilakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk dapat mengolah sumberdaya di daerahnya masing-masing.

3.1.2. Aspek Sosial Masyarakat

1) Akses petani terhadap permodalan masih terbatas

Modal adalah unsur utama dalam pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan. Sampai saat ini petani masih kesulitan untuk akses terhadap permodalan ini, meskipun pemerintah sudah banyak mengeluarkan skim kredit untuk bidang pertanian dan perkebunan. Kesulitan ini disamping disebabkan terbatasnya informasi, kemampuan manajerial dan pengetahuan petani, juga karena keengganan petani berurusan dengan pihak perbankan serta banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dimana mereka tidak mampu memenuhinya.

2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak

Pada saat ini masarakat, baik perseorangan atau korporasi masih rendah kesadaran untuk membayar pajak. Pajak masih dianggap sebagai beban. Padahal pajak merupakan kewajiban warganegara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, baik pembangunan daerah maupun

nasional. Berkaitan dengan hal tersebut saat ini masih banyak areal perkebunan yang belum terbayar Pajak Bumi dan Bangunanya (PBB).

Luas perkebunan di Provinsi Riau tahun 2018 adalah 3.509.956 ha, namun dari jumlah tersebut hanya seluas 1.225.851 hektar yang membayar Pajak PBB P3 Perkebunan, sehingga masih terdapat potensi seluas 2.284.105 hektar yang belum melakukan kewajiban membayar Pajak PBB P3 Perkebunan. Data pembayaran pajak PBB tiga tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.7. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya penertiban perizinan perkebunan, agar teridentifikasi wajib pajak perorangan dan korporasi yang akan membayar PBB, sesuai kewajibannya.

Tabel 3.7. Pembayaran Pajak PBB di Provinsi Riau Tahun 2018

No.	Kabupaten / Kota	Luas Kebun (Ha)	Luas Kebun Dibayar PBB (Ha)	Luas Kebun belum Dibayar (ha)
1	Pekanbaru	7.262	5.553	1.709
2	Dumai	42.453	150	42.303
3	Rokan Hilir	223.958	85.719	138.239
4	Indragiri Hulu	118.709	137.390	+ 18.681
5	Indragiri Hilir	493.034	223.572	269.462
6	Kuantan Singingi	218.098	66.813	151.285
7	Bengkalis	189.218	59.707	129.511
8	Kepulauan Meranti	94.145	2.043	92.102
9	Kampar	322.664	173.625	149.039
10	Rokan Hulu	268.629	178.593	90.036
11	Pelalawan	186.150	175.538	10.557
12	Siak	251.560	117.149	134.411
Jumlah		3.509.956	1.225.851	2.284.105

3) Budaya/kebiasaan masyarakat

Teknologi budidaya sebenarnya sudah berkembang pesat, namun penerapan di tingkat masyarakat/petani belum sebagaimana yang diharapkan. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhinya adalah budaya atau kebiasaan masyarakat. Budaya/kebiasaan ini mulai dari pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan, juga dalam hal waktu penanaman.

4) Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) masih rendah

Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) komoditas pertanian dan perkebunan masih rendah dan berfluktuasi. NTUP Provinsi Riau bulan September 2019 adalah 108,19, kondisi ini meningkat dari bulan Agustus yakni 107.48, namun arti angka itu perolehan keuntungan petani masih sangat kecil.

NTUP adalah membandingkan antara produksi dan biaya produksi. Upaya-upaya dalam peningkatan NTUP tersebut perlu dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraan petani.

3.1.3. Aspek Sumberdaya Manusia

1) Kapasitas dan Profesionalisme SDM aparatur belum memadai

Aparatur Negara merupakan unsur utama sumberdaya manusia yang mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat membentuk sosok aparatur pemerintah yang baik, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat adalah suatu kaharusan dari suatu organisasi birokrasi dan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia sekaligus sebagai salah satu solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu organisasi .

Sampai saat ini SDM aparatur dituntut memiliki kapasitas yang memadai dan bahkan dituntut bekerja profesional sesuai dengan perkembangan zaman yang serba maju dengan penuh dengan penerapan teknologi dalam pelaksanaann tugas pelayanan terhadap masyarakat. Sementara kondisi yang ada, adalah bahwa kemampuan dan cara kerja aparatur belum sebagaimana yang diharapkan, baik dari sisi ilmu teknis maupun dari sisi penguasaan teknologi yang semakin berkembang. Dalam penempatan para pejabat pada jabatan struktural juga masih ditemui penempatan yang belum megacu kepada aspek *“the right man in the right place”* terutama ditinjau dari sisi latar belakang pendidikan atau pengalaman bekerja selama ini.

2) Kapasitas SDM petani masih rendah

Petani merupakan SDM penting dalam pembangunan pertanian dan perkebunan, sehingga dengan demikian kemampuan SDM petani akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau capaian hasil pembangunan. Petani perkebunan secara umum didominasi oleh kaum tua dan dari kaum ibu-ibu, juga dengan pendidikan formal yang sangat rendah, hal ini membuat sulitnya dalam transformasi teknologi. Masih rendahnya SDM pertanian $\pm 80\%$ yang berusaha tani tamat SD ke bawah. Sebagai akibat dari hal tersebut adalah bahwa petani lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan daripada petani sebagai pelaksana pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut maka kedepan peningkatan kapasitas petani sebagai unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan.

3.1.4. Aspek Geografi dan Demografi

1) Perubahan iklim global

Pemanasan global dan tingkat pencemaran lingkungan berdampak terhadap aktivitas dan kehidupan manusia. Perubahan pola hujan (*El-Nino dan La-Nina*), sirkulasi angin, kenaikan muka air laut, rusaknya terumbu karang merupakan wujud dari pada perubahan iklim. Demikian juga dengan tingkat pencemaran lingkungan yang harus diwaspadai.

Di Provinsi terdapat dua kali siklus kemarau, yaitu bulan Februari dan bulan Agustus, dan pada kondisi panas tersebut terdapat situasi yang rawan kebakaran pada lahan dan hutan. Di samping itu 60% areal Provinsi Riau merupakan areal bergambut yang rawan terhadap kebakaran.

2) Tingginya Laju Pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau termasuk pada kategori yang tinggi, dimana rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Riau selama 5 tahun (2013-2017) adalah sebesar 2,7 %. Hasil Sensus Penduduk Tahun 2013, jumlah penduduk Provinsi Riau sejumlah 6.125.283 juta dan sensus Tahun 2017 berjumlah 6.657.911 juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk ini bukan saja disebabkan oleh angka kelahiran, tetapi lebih disebabkan karena migrasi penduduk dari luar Provinsi Riau yang menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan konsumsi di Provinsi Riau

3) Sebagian besar daerah sentra produksi pertanian rawan banjir dan kekeringan

Sebagaimana kita maklumi bahwa areal persawahan di beberapa kabupaten tersebar mengikuti aliran sungai baik sungai besar maupun sungai kecil, hanya sebagian kecil yang tidak berada di daerah bantaran sungai, sehingga hal ini menjadikan sebagian besar areal persawahan di Provinsi Riau sebagai daerah yang rawan banjir.

Kondisi sebaliknya juga terjadi pada musim kemarau, dimana sebagian besar areal persawahan merupakan sawah tadah hujan, sehingga selalu kekeringan. Pada sawah irigasi pun bila musim kemarau, air irigasi tidak mampu mensuplay kebutuhan air pada tanaman. Kedepan perlu adanya terobosan untuk penyelesaian masalah ini, antara lain dengan pengembangan sistem pompanisasi.

Tabel 3.8.(T-B 3.6): Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Produksi komoditas utama perkebunan belum optimal	- Rendahnya produktivitas komoditas utama perkebunan	- Masih kurangnya penerapan teknologi budidaya tanaman yang baik dan benar (<i>Good Agriculture Practices/GAP</i>) - Infrastruktur yang belum memadai - Terjadinya anomali iklim (perubahan iklim global)
		- Tingginya perubahan komoditas non kelapa sawit menjadi kelapa sawit	- Menurunnya potensi lahan produktif - Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pengaturan pola tanam (diversifikasi)
		- Kapasitas Kompetensi SDM yang masih rendah	- Kapasitas dan profesionalisme SDM Aparatur belum memadai - Kapasitas SDM petani masih rendah - Belum tercapainya program 1 Desa 1 orang Penyuluh - Pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun serta gangguan usaha yang belum menjangkau seluruh wilayah
2	Masih rendahnya mutu produk komoditas utama perkebunan	- Penanganan pasca panen yang belum optimal (<i>Good Handling Practices/GHP</i>)	- Masih kurangnya sarana pendukung pasca panen dan aplikasi teknologi pasca panen - Masih kurangnya SDM pasca panen dalam peningkatan mutu produk
3	Belum optimalnya kinerja perkebunan dalam menyumbang penerimaan daerah	- Belum optimalnya pendataan pelaku usaha perkebunan	- Masih banyaknya kepemilikan usaha perkebunan yang belum terdaftar dan/atau tanpa izin - Masih banyaknya pelaku usaha perkebunan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak - Masih minimnya informasi perpetaan kawasan perkebunan dari pelaku usaha perkebunan
		- Belum optimalnya keberterimaan produk perkebunan di luar negeri	- Masih kurangnya penerapan teknologi pengolahan yang baik dan benar (<i>Good Manufacturing Practices/GMP</i>) - Masih belum semuanya memiliki sertifikat berlanjutan/kelestarian (<i>sustainability</i>) -

Tabel 3.9 : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di luar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian					
1. Gambaran Pelayanan SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan data dan informasi perkebunan belum optimal - Pemberdayaan terhadap masyarakat/petani belum maksimal - Secara umum rasio pencapaian kinerja pelayanan sudah memenuhi setiap target yang diinginkan, bahkan terdapat beberapa yang melebihi. Namun terdapat beberapa sasaran yang tidak konsisten dilaksanakan setiap tahunnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fungisonalisasi Website. - Buku Statistik Perkebunan - SOP metode Pemberdayaan - Realisasi Renstra Dinas 2014-2019 terhadap target renstra (rasio capaian) 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM Aparatur - Akses terhadap data dan informasi - Prasarana dan sarana Teknologi Informasi - Keterbatasan jumlah tenaga teknis 	<ul style="list-style-type: none"> - Sinergitas antar sektor/ stakeholders - Ketersediaan data dan informasi dari instansi terkakit - Masih rendahnya minat investor untuk menanamkan investasi di Provinsi Riau - Belum terjadinya akses jual/pemasaran dari produk olahan keluar dari Provinsi Riau 	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas aparatur terbatas - SDM aparatur bidang teknis tertentu masih kurang - Ketersediaan data dan informasi yang akurat dan mutakhir terbatas - Metode pemberdayaan belum diterapkan secara baik - Lemahnya koordinasi lintas sektor antara provinsi dengan Kab/Kota

<p>2. Kajian terhadap Renstra SKPD</p>	<p>Luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas komoditas utama tanaman perkebunan</p>	<p>Angka Tetap (ATAP) dan Angka Sementara (ASEM) BPS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SDM aparatur - Prasarana dan sarana - Tingkat penerapan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosial budaya masyarakat - Sumberdaya manusia petani - Kondisi geografi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas SDM pertanian belum mantap - Rendahnya tingkat penerapan teknologi - Koordinasi antar pelaku usaha dan stakeholder masih rendah - Sebagian besar wilayah rawan bencana alam
	<p>Produksi komoditas kelapa sawit, karet dan sagu dalam 5 (lima) tahun terakhir fluktuatif cenderung naik, sedangkan komoditas kelapa menurun.</p>	<p>Statistik Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014-2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peranan UPT - Sinergitas Tupoksi - SDM aparatur - Prasarana dan sarana - Pemasarakatan teknologi - Peranan UPT 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumberdaya Manusia Petani - Kondisi Geografi dan Demografi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan teknologi belum optimal - Tingginya pertumbuhan penduduk - Sebagian besar wilayah rawan Bencana Alam - Sosial budaya Masyarakat - Perubahan iklim (anomali) - Kemampuan aparatur dalam akses data dan informasi kurang - Kapasitas SDM belum memadai - Kemampuan aparatur dalam akses data dan informasi kurang

<p>3. Kajian terhadap Renstra K/L</p>	<p>Dukungan terhadap upaya mencapai 6 (enam) sasaran Kementerian Pertanian di Provinsi belum maksimal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi komoditi Perkebunan - Pengembangan komoditi perkebunan alternatif 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM Aparatur - Dukungan sarana dan prasarana yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi lahan tidak mendukung. - Alih Fungsi lahan - SDM Petani - Sinergitas antar sektor dan stake holder terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas SDM pertanian belum mantap - Lambannya peningkatan produktivitas - Penerapan teknologi - Tingginya pertumbuhan penduduk - Sebagian besar wilayah rawan bencana alam - Tingginya alih fungsi lahan - Sosial budaya masyarakat - Anomali iklim - Kemampuan aparatur dalam akses data dan informasi kurang. - Satuan biaya untuk pengembangan produksi perkebunan tidak memadai
---------------------------------------	--	---	--	---	---

<p>4. Kajian Terhadap RTRW</p>	<p>Berdasarkan RTRW Provinsi Riau yang sudah disahkan, indikasi arahan peraturan pemanfaatan kawasan perkebunan seluas 2.602.746,47 ha, terdiri dari Perkebunan Besar seluas 1.632.242,78 ha dan Perkebunan Rakyat seluas 970.503,70 ha.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perkebunan. - RTRW Nasional 	<p>Tidak tersedianya data yang akurat dan valid tentang lahan perkebunan existing dan cadangan lahan perkebunan berkelanjutan</p>	<p>Pengesahan peruntukan Lahan oleh Kemterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum samanya persepsi tentang status penggunaan lahan antara Kementerian terkait dengan Pemprov Riau.
--------------------------------	--	---	---	---	--

<p>5. Kajian Terhadap KLHS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pembangunan saat ini harus mengacu kepada Pembangunan Pertanian yang Berkelanjutan dan terjaminnya kelestarian Lingkungan Hidup. - Dalam pelaksanaan usaha tanaman perkebunan saat ini masih banyak yang menggunakan pupuk anorganik. 	<ul style="list-style-type: none"> - RPJMN - RPJMD - Renstra Kementerian - Sustainable Development Goals (SDGs) 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM aparatur - Prasarana dan sarana terutama laboratorium - Pemasarakatan pedoman dan standarisasi - Peranan UPT - Sinergitas tupoksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sinergitas antar sektor/stakeholders - Ketersediaan data dan informasi dari Instansi terkakit 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya pemahaman aparatur dalam hal pembangunan berkelanjutan, keamanan pangan, dll - Masih terbatasnya upaya sosialisasi kepada masyarakat. - Belum mantapnya koordinasi lintas instansi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan
--------------------------------	--	---	---	--	--

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.2.1. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2000 – 2025, RPJMD Provinsi Riau merupakan tahap keempat pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan pertumbuhan perekonomian yang berdaya saing berdasarkan sumberdaya alam yang tersedia dan sumberdaya manusia yang berkualitas didukung oleh sistem informasi yang handal. Upaya pemantapan nilai-nilai budaya melayu sebagai ruh kehidupan masyarakat terwujud sebagai etika, orientasi, dan sumber inspirasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Riau; penyelenggaraan pembangunan; pelestarian lingkungan; asimilasi kultural; menjaga dan memelihara heterogenitas.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih telah merumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2020 – 2024, yaitu :

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia“

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

- Berdaya Saing : Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal.
- Sejahtera : Kondisi kemakmuran masyarakat riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran
- Bermartabat : Mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengamalan nilai-nilai agama serta penerapan falsafah budaya melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat.
- Unggul : Menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni, dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah.

VISI : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia

Tabel 3.10. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 3 : Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.			
	Program 1.1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu hasil pertanian 1.2. Pemberdayaan Penyuluhan pertanian/Perkebunan	1. Kapasitas aparatur dinas belum optimal. 2. Jumlah petugas teknis tertentu masih kurang (keterbatasan jumlah dan tingkat kualifikasi aparat penyelenggara pembangunan perkebunan khususnya tenaga pengawas benih dan pengamat Hama). 3. Terbatasnya sarana dan prasarana perkebunan. 4. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal. 5. Peran dan fungsi lembaga unit pelaksana teknis dan unit pelayanan teknis lainnya belum optimal. 6. Sinergisitas tupoksi antar bidang dan UPTD belum terjalin dengan baik. Masih rendahnya SDM pertanian ± 80% yang berusaha tani tamat SD ke bawah.	1. Semakin tingginya alih fungsi lahan. 2. Menurunnya tingkat kesuburan tanah pertanian. 3. Kondisi jaringan pengairan tidak memadai. 4. Anomali Iklim. 5. Mahalnya agro input (sarana produksi dan alat mesin pertanian). 6. Kemampuan permodalan petani terbatas. 7. Penerapan teknologi terbatas untuk memperoleh informasi	1. Komitmen Pimpinan. 2. Sudah adanya program dan kebijakan yang tegas tentang upaya pengentasan kemiskinan. 3. Sudah adanya program dan kebijakan yang tegas tentang upaya pembangunan perkebunan berkelanjutan. 4. Penyediaan tenaga aparatur yang berkompeten. 5. Menempatkan petugas pertanian ke institusi yang menangani pertanian, 6. Peningkatan frekuensi penyuluhan ke petani

3.2.2. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi yang telah ditetapkan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2020–2024, sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.
4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

Dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Tahun 2020 – 2024 ini terlihat bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih telah menetapkan pembangunan pertanian dan perkebunan sebagai salah satu bidang yang menjadi perhatian dan akan diperkuat dalam kurun waktu 2020 – 2024, sebagaimana tercantum pada misi ke-3, yaitu **“Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing “**.

Beberapa hal yang menjadi program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur yang kebijakannya akan dilaksanakan pada arah dan program dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 sampai dengan kegiatan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah, yang terkait langsung dan tidak langsung dengan pembangunan perkebunan adalah :

1. Melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan masyarakat, dunia usaha dan aparat penegak hukum;
2. Penegakan hukum (*law enforcement*) bagi pelaku perusakan lingkungan (kebakaran hutan dan lahan, pencemaran udara dan air);
3. Menjalin kerjasama dengan PKS dan internasional Finance Cooperation (IFC) untuk memberikan pelatihan agronomi, legal dan bisnis bagi petani sawit swadaya;
4. Mempercepat pertumbuhan kluster-klaster agro industri yang terintegrasi dari hulu sampai hilir di kawasan industri Tanjung Buton, Kuala Enok, dan Tenayan, untuk menopang Kawasan industri Dumai yang telah berjalan;
5. Peremajaan kebun sawit (*replanting*) petani swadaya;

6. Bantuan alat, bibit unggul dan sarana produksi untuk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
7. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pertanian seperti irigasi, mekanisasi dan sarana produksi pertanian;
8. Penerapan teknologi pompanisasi;
9. Memberikan kemudahan akses permodalan bagi petani;
10. Pengembangan sapi dengan pola system integrasi sapi dan kelapa sawit (SISKA) dan sistem integrasi sapi dan padi (SISPA);
11. Melakukan promosi dan pemasaran hasil pertanian, dan perkebunan melalui media cetak, media elektronik dan pameran Indonesia agri bisnis expo serta menjalin kerjasama dengan dunia usaha;
12. Peningkatan dan pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh.

Dalam upaya pencapaian visi misi kepala daerah dalam hal ini gubernur, Dinas Perkebunan mempunyai peran dalam mewujudkan pembangunan perkebunan dalam pencapaian masyarakat sejahtera dan berdaya saing. Sinergi dengan visi misi tersebut Dinas Perkebunan bertanggungjawab terhadap pembangunan perkebunan.

Untuk mencapai misi tersebut di atas tidak lepas dari dukungan tata pemerintahan yang handal dan kerjasama lintas sektor lingkup pemerintah Provinsi Riau. Untuk menciptakan tatakelola yang handal tersebut perlu melakukan terobosan melalui kinerja yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi akuntabel untuk mewujudkan pembangunan perkebunan di Provinsi Riau. Oleh karena itu perlu komitmen dan kompetensi SDM bidang perkebunan melalui peningkatan kualitas.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Pelaksanaan pembangunan pertanian periode tahun 2015-2019 merupakan tahap ke-4 dari pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJP) tahun 2005-2025. Oleh karena itu diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan kegiatan pembangunan periode sebelumnya dan menjawab isu-isu terkini, serta mengacu pada Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) tahun 2015-2045. Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula;
2. Peningkatan diversifikasi pangan;

3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor;
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy;
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani;
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Berdasarkan rincian dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita) tersebut, maka agenda prioritas di bidang pertanian terdiri dari dua hal, yaitu (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan.

(1) Peningkatan Agroindustri, sebagai bagian dari agenda 6 Nawa Cita (Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional). Sasaran dari peningkatan agroindustri adalah:

- a. Meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif;
- b. Meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor, dan
- c. Berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan. Komoditi yang menjadi fokus dalam peningkatan agroindustri diantaranya kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi, kelapa, mangga, nenas, manggis, salak, kentang.

Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakan difokuskan pada: (1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi:

- a. Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat.
- b. Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil pertanian dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati,
- c. Pengembangan agroindustri perdesaan.
- d. Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran.
- e. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber sumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar.
- f. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif.

- (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan adalah bagian dari agenda ke 7 Nawa Cita (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan. Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi. Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah:
- a. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsigula rumah tangga.
 - b. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga.
 - c. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019).
 - d. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan.
 - e. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta Ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deteriorasi.
 - f. Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha.
 - g. Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan **Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP)** sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan
2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian
3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit
4. Penguatan kelembagaan petani
5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian
6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi
7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian

Selain tujuh strategi utama, terdapat Sembilan Strategi Pendukung sebagai berikut :

1. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian
2. Peningkatan dukungan perkarantinaan
3. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi
4. Pelayanan informasi publik
5. Pengelolaan regulasi
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
7. Pengelolaan perencanaan
8. Penataan dan penguatan organisasi
9. Pengelolaan sistem pengawasan

Kementerian Pertanian telah menetapkan Visi Pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu ***“Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani “***.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, telah ditetapkan Misi yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan;
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan;
3. Mewujudkan kesejahteraan petani;
4. Mewujudkan reformasi birokrasi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian;

3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy;
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani;
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula;
2. Peningkatan diversifikasi pangan;
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor;
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy;
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani;
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Renstra Kementerian Pertanian RI akan dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang akan datang. Mengacu kepada Renstra Kementerian Pertanian, target kinerja dari Kementerian Pertanian selama 2015-2019 adalah pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Pencapaian swasembada ditujukan untuk padi, jagung, kedelai, daging sapi dan gula. Dengan target sasaran produksi adalah padi 82,1 juta ton, jagung 24,7 juta ton kedelai 3,00 juta ton, dan gula 3,82 juta ton pada Tahun 2019.

Selanjutnya, pada aspek peningkatan peran dan fungsi kelembagaan diarahkan untuk : (i) meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan serta SDM; (ii) meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat; (iii) meningkatkan kerjasama internasional; (iv) meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi, data dan informasi; (v) meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pada Tahun 2014 Kementerian Pertanian RI telah menyusun dan mengeluarkan "**Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) "** yang secara simbolis telah diserahkan kepada berbagai pihak termasuk Presiden RI pada saat acara pembukaan Pekan Nasional KTNA di Kabupaten Malang – Provinsi Jawa Timur pada bulan Juni 2014 yang lalu. SIPP ini juga diharapkan menjadi arahan sekaligus acuan bagi seluruh komponen bangsa, dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM), Renstra kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan turunannya, baik dipusat maupun daerah.

Memperhatikan peran strategis dan multidimensi pertanian serta tantangan besar ke depan, maka paradigma “Pembangunan berbasis pertanian (*agricultural led development*) “ sudah tidak relevan lagi, perlu direorientasi dengan paradigma baru. Paradigma baru tersebut pertama adalah **Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*)** bahwa rencana pembangunan perekonomian nasional disusun dan dilaksanakan berdasarkan tahapan pembangunan pertanian secara rasional.

Sektor pertanian dijadikan sebagai motor penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh. Paradigma yang kedua adalah **Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan** sebagai transformasi dari orientasi pembangunan berbasis bahan baku fosil menjadi berbasis sumberdaya terbarukan (sumberdaya hayati). Paradigma ini menuntut peran pertanian tidak hanya penghasil utama bahan pangan, tetapi menjadi penghasil biomassa bahan baku biorefinery untuk menghasilkan bahan pangan, pakan, pupuk, serat, energy, produk farmasi, kimiawi dan bioproduk lainnya.

Berdasarkan kondisi yang ada selama ini dan menyadari akan tantangan dimasa depan, maka Visi Pembangunan Pertanian Indonesia 2015 – 2045 dirumuskan sebagai berikut :

“ Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi dari sumberdaya hayati pertanian dan kelautan tropika “

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dalam priode 2015 – 2045, maka pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan 10 sasaran, dimana 2 (dua) di antaranya yang sangat terkait dengan sektor pertanian dan perkebunan adalah :

1. Meningkatnya pendapatan dan taraf hidup penduduk perdesaan sehingga seluruh penduduk desa terbebas dari kemiskinan paling lambat pada tahun 2030.
2. Terwujudnya kemandirian pangan nasional paling lambat pada 2020, kedaulatan pangan nasional, tercapainya pola makan sehat dan beragam paling lambat pada tahun 2025 dan kedaulatan pangan komunitas paling lambat tahun 2045.

Pembangunan sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan dilaksanakan dengan **Paradigma Biokultura**, yaitu kesadaran, semangat, nilai budaya, dan tindakan memanfaatkan sumberdaya hayati bagi kesejahteraan manusia dalam ekosistem yang harmonis. Strategi utama yang

dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan system Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan adalah :

1. Pengembangan sumberdaya insan yang kompeten dan berkarakter pertanian;
2. Optimalisasi sumberdaya alam;
3. Sistem inovasi ilmu pengetahuan dan rekayasa teknologi;
4. Infrastruktur pertanian, akses pembiayaan dan akses pasar;
5. Sistem usahatani agroindustri dan *agroservices* terpadu;
6. Klaster rantai nilai bioindustry;
7. Lingkungan pemberdaya bio-bisnis;

Salah satu kebijakan yang akan diterapkan dalam mewujudkan tujuan dan strategi diatas adalah dengan menerapkan "**Kebijakan ketahanan pangan, air dan energi**". Sejalan dengan itu, juga telah disusun Tahapan Periodik Pembangunan Pertanian, dimana periode **2015 – 2019** merupakan periode "**Kokohnya fondasi sistem pertanian- bioindustri berkelanjutan**" menuju tercapainya keunggulan daya saing pertanian terpadu berbasis sumberdaya alam berkelanjutan, sumberdaya insani berkualitas dan berkemampuan IPTEK bioindustri untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Disamping itu juga telah ditetapkan "**Peta jalan (roadmap)**" pengembangan sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan, di mana periode 2015 – 2019 merupakan tahap dimana indikator sosok usahatannya adalah usahatani dengan sistem pertanian terpadu, indikator sosok petaninya adalah petani pelaku aktivitas *on-farm* serta status ketahanan- kedaulatan pangannya adalah kemandirian pangan nasional menuju kedaulatan pangan nasional dengan sistem pertanian terpadu sudah terbangun.

SIPP ini akan dijadikan bahan rujukan dasar dan akan disejalankan dengan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam rangka ,menciptakan dan mewujudkan pembangunan pertanian terpadu yang berkelanjutan di Provinsi Riau.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pembangunan perkebunan tidak bisa terlepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis suatu wilayah saat ini dan di masa mendatang. Dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), salah satu isu utama pembangunan berkelanjutan tersebut adalah rendahnya ketahanan pangan dan keragaman genetik benih. Kerusakan ekosistem pada lahan pertanian disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain model pengelolaan lahan pertanian yang

tidak berkelanjutan yang dapat menyebabkan menurunnya produktivitas dan produksi. Hal ini berpengaruh besar terhadap ketahanan pangan.

Dalam menyusun Rencana strategis (Renstra) tahun 2020–2024 harus mengacu kepada master plan Perkebunan Provinsi Riau sebagai Rencana Pengembangan Kawasan Pertanian sesuai dengan Permentan No. 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. Penyusunan rencana pengembangan kawasan sentra produksi, merupakan upaya untuk mempercepat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penetapan kawasan sentra produksi ini guna pengembangan komoditas utama/unggulan suatu daerah baik sub sektor tanaman pangan, Hortikultura maupun sub sektor perkebunan.

Komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Provinsi Riau ditentukan dengan mempertimbangkan faktor tingkat kesesuaian lahan, pemusatan komoditas, tingkat pertumbuhan luas tanam dan tingkat pertumbuhan produksi perkebunan. Dari kajian masterplan perkebunan, komoditas perkebunan yang layak ditetapkan sebagai komoditas unggulan adalah : kelapa sawit, karet, kelapa dan sagu. Daerah Provinsi Riau juga merupakan salah satu Provinsi dengan areal perkebunan yang terluas di Indonesia, dimana saat ini terdapat sekitar 3,5 juta hektar luas areal perkebunan di Provinsi Riau dengan berbagai komoditas perkebunan. Luas areal perkebunan ini didominasi oleh perkebunan kelapa sawit, kemudian karet dan kelapa.

Ancaman krisis pangan saat ini dan ke depan di Indonesia dan bahkan di seluruh belahan bumi akan semakin serius, baik sebagai akibat semakin berkurangnya lahan pertanian, pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global sangat dirasakan saat ini, dimana kekeringan dan banjir setiap Tahun melanda wilayah Riau dan Indonesia secara keseluruhan. Sejak Tahun 2010 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat celcius dan ada kecendrungan peningkatan setiap tahunnya. Bagi sektor pertanian dan perkebunan tentunya kondisi ini sangat berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan produksi, bahkan dapat mengakibatkan gagal panen atau puso.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dari aspek gambaran pelayanan dan kajian terhadap Renstra K/L, RTRW dan KLHS ditentukan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai berikut :

a. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa kekuatan dan kelemahan. Dengan mencermati gambaran pelayanan Dinas Perkebunan, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

i. Kekuatan (*strenghts*):

1. Tersedianya Sumberdaya manusia;
2. Tersedianya sumberdaya lahan;
3. Tersedianya teknologi (Informasi, budidaya, perlindungan, perbenihan dan sarana produksi);
4. Tersedianya komoditas tanaman perkebunan untuk pemenuhan pangan dan industri;
5. Tersedianya peraturan/per Undang-undangan;
6. Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis, kebijakan.

ii. Kelemahan (*weakness*):

1. Penerapan teknologi budidaya tanaman yang belum optimal;
2. Infrastruktur, prasarana dan sarana perkebunan yang belum memadai;
3. Penanganan pasca panen, pembinaan mutu, pemasaran hasil perkebunan yang belum optimal;
4. Pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) dan penanganan gangguan usaha dan kebakaran lahan yang belum menjangkau seluruh wilayah;
5. Masih terbatasnya pelaksanaan sertifikasi & pengawasan mutu benih.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa peluang dan tantangan. Dengan mencermati dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun internasional, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut

Peluang (*opportunities*):

1. Potensi sumberdaya tanaman perkebunan masih dapat ditingkatkan;
2. Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri;
3. Iklim investasi terhadap produk perkebunan kondusif;
4. Meningkatnya kebutuhan bahan pangan;
5. Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim sudah menjadi komitmen pemerintah.

Tantangan (*threats*):

1. Produksi/produktivitas tanaman perkebunan masih rendah;
2. Alih fungsi lahan setiap tahun terus meningkat;
3. Penguasaan teknologi pertanian masih rendah;
4. Isu lingkungan hidup dan globalisasi;
5. Daya saing produk olahan pertanian serta pemasaran masih terbatas;
6. Kontribusi sektor pertanian terhadap peningkatan pendapatan petani belum maksimal
7. Akses petani terhadap permodalan masih terbatas.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Visi pembangunan Provinsi Riau yaitu : **“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)”**. Visi Riau untuk pembangunan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2024 memiliki makna berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul dengan penjelasan sebagai berikut :

- Berdaya Saing**
- Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan)
 - Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar
 - Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan kemandirian daerah

Usulan :

Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal.

- Sejahtera**
- Mengurangi ketimpangan sosial
 - Menanggulangi kemiskinan
 - Menurunkan tingkat pengangguran

Usulan :

Kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran.

- Bermartabat**
- Meningkatkan kehidupan beragama
 - Melestarikan adat istiadat
 - Mengembangkan nilai sosial dan budaya

Usulan :

Mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengamalan nilai-nilai agama serta penerapan falsafah budaya melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat.

- Unggul**
- Prestasi di bidang seni, budaya dan agama
 - Prestasi di bidang olahraga
 - Terbaik dan terdepan dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan
 - Terobosan dan inovasi daerah

Usulan :

Menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni, dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dituangkan ke dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 – 2024 yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau untuk periode 5 (lima) tahun dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan Provinsi Riau akan mendukung terlaksananya Misi ke 3 (Tiga) yaitu **Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing** dan Misi ke 5 (Lima) yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi**.

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

➤ Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan Provinsi Riau serta tugas pokok dan fungsi maka tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah :

1. Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik;
2. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan petani perkebunan;

➤ Sasaran

Dengan mengacu tujuan maka sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel;
2. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan dan peningkatan kompetensi SDM petani;

Dalam rangka mewujudkan visi melalui misi yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diuraikan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perkebunan Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 4.1 (T.IV.C.25) berikut :

Tabel 4.1 (T.IV.C.25)
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024
 (IKU DINAS PERKEBUNAN)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal	TARGET KINERJA SASARAN (TAHUN)				
				2018	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	63,5 (B)	67 (B)	69 (B)	70 (B)	71 (BB)	72 (BB)
2.	Meningkatkan pendapatan petani tanaman perkebunan	Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan	Jumlah produksi Komoditas Utama Perkebunan						
			- Kelapa sawit (ton)	7.611.636,40	7.918.313,20	8.071.651,60	8.224.990,00	8.378.328,40	8.531.666,80
			- Kelapa (ton)	388.178,00	389.457,00	391.457,00	393.457,00	395.457,00	397.457,00
			- Karet (ton)	363.145,50	377.618,50	384.855,00	392.091,50	399.328,00	406.564,50
			Produktivitas Tanaman Perkebunan						
			- Kelapa sawit (ton)	3,45	4,02	4,08	4,14	4,20	4,26
			- Kelapa (ton)	0,93	2.649,00	2.662,00	2.676,00	2.689,00	2.703,00
			- Karet (ton)	1,05	1.236,00	1.239,00	1.242,00	1.259,00	1.271,00
			- Sagu (ton)	7,49	7.609,00	7.690,00	7.809,00	7.903,00	8.003,00
			Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
NTUP Perkebunan	98,54	99,55	100,10	100,60	102,10	102,60			

Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan indikator kinerja sasaran dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

I. Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik

Terwujudnya peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

- Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Formulasi Perhitungan : Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD

II. Meningkatkan pendapatan petani tanaman perkebunan

- Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan

- Jumlah produksi komoditas utama tanaman perkebunan.

Formulasi Perhitungan : jumlah produksi komoditas utama tanaman perkebunan tahun berkenaan.

Untuk menghitung pendapatan petani dilakukan dengan menghitung :

1. NTUP Tanaman Perkebunan

Formulasi perhitungan : Data BPS

2. Tingkat pendapatan petani komoditas utama tanaman perkebunan (Rp/th)

Formulasi perhitungan : Rata-rata harga komoditi tanaman perkebunan tahun berkenaan dikali jumlah produksi dibagi 12 (dua belas) bulan.

- Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM petani

- Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya

Formulasi Perhitungan : jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sampai dengan tahun berkenaan dibagi dengan jumlah petani perkebunan yang ada dalam Simluhtan di kali seratus



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang mengacu pada Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024, maka Dinas Perkebunan Provinsi Riau mendukung Misi 3 (Tiga) dan Misi 5 (Lima) Pemerintah Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

VISI : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)

MISI 3 : Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing

Tujuan : Mewujudkan Perekonomian yang mandiri dan berdaya saing

Sasaran : Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan

MISI 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi

Tujuan : Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik

Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel

5.1 STRATEGI

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dalam menentukan strategi dilakukan dengan evaluasi faktor-faktor lingkungan strategi yang mempengaruhi dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weakness*, peluang/*opportunities*, dan tantangan/*threats*). Berdasarkan analisis SWOT dan pembobotan faktor-faktor internal dan eksternal maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun;

Strategi pengembangan komoditas unggulan perkebunan kedepan perlu ditekankan, diintensifkan dan difokuskan pada peningkatan kualitas komoditas unggulan baik pada penerapan teknologi produksi, teknologi pascapanen, efisiensi biaya produksi, standarisasi mutu, pengolahan sampai dengan pemasaran. Pemberdayaan pekebun dengan fokus pembinaan, pendampingan dan

pelatihan kelompok tani dalam optimalisasi komoditas unggulan daerah perlu dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat pekebun secara berjenjang dan berkelanjutan agar terwujud komoditas unggulan daerah yang berkualitas, tangguh dan mampu bersaing dalam era pasar bebas baik pasar global maupun pasar ASEAN. Selain itu aspek penyuluhan akan memegang peranan penting dalam peningkatan kapasitas pengetahuan dan inovasi petani/pekebun.

2. Memperkokoh fondasi sistem pertanian bio-industri berkelanjutan;

Pemenuhan penyediaan bahan baku bioenergi dan pengembangan pondasi sistem pertanian bio-industri dengan fokus pengembangan komoditas kelapa sawit baik melalui kegiatan budidaya dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas maupun melalui kegiatan integrasi tanaman perkebunan dengan ternak dan tumpang sari dengan komoditas pertanian lainnya.

3. Peningkatan kompetensi SDM aparatur / petani

Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia baik aparatur maupun petani sebagai pelaku usaha melalui peningkatan kompetensi petugas/petani dan kelembagaan guna meningkatkan usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman perkebunan guna peningkatan budaya usaha tani yang maju dan berkelanjutan

4. Peningkatan kualitas pelayanan internal OPD (bersih, transparan, dan akuntabel)

Strategi peningkatan pelayanan internal OPD yang bersih, transparan dan akuntabel diarahkan pada peningkatan pelayanan publik bidang perkebunan secara akuntabel, profesional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan pembangunan perkebunan serta kebijakan pembangunan di Provinsi Riau, maka dirumuskan arah kebijakan yang akan menjadi kerangka pembangunan perkebunan periode 2020-2024 adalah :

1. Kebijakan Umum :

- Peningkatan produksi tanaman perkebunan secara berkelanjutan
- Peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan.
- Mewujudkan fasilitasi pembinaan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

- Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan
- Mewujudkan integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan
- Meningkatkan kompetensi kualitas dan kuantitas SDM dan kelembagaan petani serta pelaku usaha dalam kemampuan, ketrampilan, pengetahuan dan kemandirian serta memperkuat pemberdayaan kelembagaan baik ekonomi maupun sosial.
- Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan
- Mendorong pengembangan pemasaran produk perkebunan ditataran domestik dan internasional yang berkualitas dan berdaya saing
- Mewujudkan sistem pertanian bio-industry berbasis pengembangan komoditas perkebunan
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

2. Kebijakan Teknis :

- Peningkatan produksi tanaman perkebunan secara berkelanjutan dimaksudkan untuk memfokuskan pengembangan komoditas perkebunan unggulan daerah yang memiliki manfaat dan fungsi strategis dalam perekonomian daerah dan berkontribusi terhadap sumber penerimaan negara seperti kelapa sawit, karet, kelapa dan sagu. Pengembangan komoditas unggulan perkebunan tersebut dipilih pada lahan-lahan eksisting dan bukaan baru yang sesuai dengan potensi, kebutuhan dan kesiapan daerah. Fokus pengembangan komoditas unggulan perkebunan yang memiliki manfaat dan fungsi strategis dipersyaratkan layak secara ekonomi, layak bio-fisik/agro-ecosystem, layak sosial, layak pasar dan layak pengembangan atau memiliki potensi keberlanjutan. Pengembangan komoditas tersebut diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan, pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih, penanganan pascapanen, pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan serta pemberian pelayanan berkualitas. Selain itu, arah kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mendorong usaha agribisnis perkebunan dibudidayakan melalui sistem budidaya perkebunan yang baik dan berkelanjutan agar dihasilkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan yang optimal.

- Peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan dimaksudkan untuk meningkatkan penerapan teknologi melalui adopsi teknologi kepada petani dengan penyediaan alat dan mesin pertanian, melakukan surveilance dan pengujian hama dan penyakit tanaman perkebunan, pemantauan, pengawasan dan pengujian pupuk dan pestisida, pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan, pengembangan dan pengujian mutu benih, intensifikasi , pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian, pengelolaan lahan dan air melalui normalisasi saluran drainase serta pembangunan dan rehabilitasi jalan produksi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan adopsi teknologi pada tingkat petani agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dan lebih optimal, meningkatkan nilai tambah, atau lebih efisien dalam melakukan usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman.
- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggaraan penyuluhan yang maju dan berkelanjutan; mendorong dan memfasilitasi kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama, pelaku usaha (stakeholder) serta lembaga swadaya masyarakat, guna meningkatkan usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis perkebunan dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada. Usaha yang akan ditempuh meliputi :
 - a. Meningkatkan kemampuan, ketrampilan, pengetahuan dan kemandirian petani serta petugas/aparatur melalui pelatihan
 - b. Memperkuat pemberdayaan kelembagaan petani baik ekonomi (koperasi) maupun sosial (asosiasi)
- Meningkatkan nilai tambah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengembangkan industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil tanaman perkebunan dengan memfasilitasi unit pengolahan produk, mendorong terwujudnya klaster industri hilir, meningkatkan intensitas promosi produk perkebunan, memperkuat jaringan pemasaran hasil olahan , meningkatkan mutu hasil produk melalui pembinaan pengolahan mutu produk petani dan pelaku usaha agribisnis serta meningkatkan akses kemitraan pemasaran dan pengembangan informasi pasar
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik bidang perkebunan secara akuntabel dan profesional

Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Gubernur sesuai yang tertuang dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau mempunyai tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan, tananaman pangan dan hortikultura seperti Tabel 5.1 (T-C.26) berikut :

Tabel 5.1.
(Tabel.T-C. 26 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)			
Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan daya saing subsektor Perkebunan	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun	1. Peningkatan produksi tanaman perkebunan secara berkelanjutan
			2. Peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan.
			3. Terwujudnya fasilitasi pembinaan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.
			4. Terwujudnya sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan
			5. Terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan
			6. Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani perkebunan yang lebih baik.
			7. Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan
			8. Mendorong pengembangan pemasaran produk perkebunan di tataran domestik dan internasional yang berkualitas dan berdaya

			saing.
			9. Mendorong peningkatan kontribusi sub sektor perkebunan bagi pemerintah daerah
			10. Mendorong peningkatan konservasi dan rehabilitasi lahan perkebunan.
Meningkatkan pendapatan petani	Meningkatnya Nilai Tukar Petani	Peningkatan Luas Tanam	1. Peningkatan luas tanam perkebunan
			2. Peningkatan diversifikasi tanaman
		Peningkatan produktivitas	1. Tersedianya sarana pertanian
			2. Tersedianya prasarana pertanian
		Peningkatan Kompetensi SDM	1. Tersedianya petugas / kelembagaan yang berkompeten
			2. Tersedianya petani /kelembagaan yang berkompeten

Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi			
Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Peningkatan kualitas pelayanan internal OPD	1. Peningkatan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien
			2. Peningkatan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan
			3. Peningkatan pelayanan publik bidang Perkebunan secara akuntabel dan profesional

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Riau maka tujuan utama program pembangunan tanaman perkebunan adalah meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan petani tanaman perkebunan melalui peningkatan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) Perkebunan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Perkebunan dan sesuai hasil analisa terhadap potensi, permasalahan, peluang dan tantangan dalam pembangunan tanaman perkebunan di Provinsi Riau serta memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Riau, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan pembangunan tanaman perkebunan Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut:

a. Program Utama :

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan
2. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pekebunan

b. Program Pendukung :

Untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan organisasi, maka ditetapkan program pendukung sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN (URUSAN)

A. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Peningkatan Akses kemitraan petani Kelapa
2. Pembangunan kebun sagu rakyat
3. Diversifikasi tanaman perkebunan rakyat

4. Pembinaan dan Pengawasan Program Pembiayaan Usaha Perkebunan untuk Program Peremajaan
5. Peningkatan Mutu Hasil Produk Perkebunan
6. Pengawasan dan sertifikasi benih Perkebunan
7. Intensifikasi tanaman perkebunan
8. Penumbuhan dan pengembangan Penangkar Bibit/Benih perkebunan
9. Pengembangan Perbenihan Perkebunan
10. Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan
11. Normalisasi saluran drainase pada areal perkebunan rakyat
12. Pembangunan *water management* di kawasan perkebunan rakyat
13. Pembinaan dan pengadaan alat pasca panen dan pengolahan hasil Perkebunan
14. Peremajaan kebun kelapa rakyat
15. Pengadaan alat mekanisasi perkebunan
16. Pembinaan, Pengawasan dan Penataan izin usaha perkebunan
17. Peremajaan kebun karet rakyat

B. Program Pemberdayaan Penyuluhan Perkebunan dilaksanakan melalui :

1. Pelatihan Petani dan Petugas Perkebunan
2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyuluh perkebunan
3. Pekan Nasional/Daerah KTNA Perkebunan

6.2 PROGRAM DAN KEGIATAN (NON URUSAN)

Untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan organisasi, maka ditetapkan program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Pelayanan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan jasa administrasi kantor
- Penyediaan jasa keamanan kantor
- Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan perlengkapan gedung/kantor
- Pengadaan peralatan gedung/kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas / operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan pakaian harian khusus hari-hari tertentu

Indikasi Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kinerja dan Pendanaan Periode tahun 2020-2024 ditampilkan pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Program Dinas Perkebunan Provinsi Riau

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOTOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (TAHUN)					Kondisi Akhir th 2024
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Tercukupinya sarana dan prasarana kerja aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan kedisiplinan aparatur	Persentase tingkat kehadiran ASN	100	100	100	100	100	100
4.	Meningkatkan produksi perkebunan	Terwujudnya peningkatan produksi Perkebunan	Jumlah Produksi (ton)						
			Kelapa Sawit	7.918.313,20	8.071.651,00	8.224.990,00	8.378.328,40	8.531.666,80	8.531.666,80
			Kelapa	389.457,00	391.457,00	393.457,00	395.457,00	397.457,00	397.457,00
			Karet	377.618,50	384.855,00	392.091,50	399.328,00	406.564,50	406.564,50
			Jumlah Produktivitas						
			- Sagu (kg/ha/th)	7.609,00	7.690,00	7.809,00	7.903,00	8.003,00	8.003,00
			- Kelapa Sawit (ton/ha/th)	4,02	4,08	4,14	4,20	4,26	4,26
			- Kelapa (kg/ha/th)	2.649,00	2.662,00	2.676,00	2.689,00	2.703,00	2.703,00
- Karet (kg/ha/th)	1.236,00	1.239,00	1.242,00	1.259,00	1.271,00	1.271,00			

RENSTRA TAHUN 2020 – 2024

5.	Meningkatkan pemberdayaan penyuluhan perkebunan	Terwujudnya peningkatan kapasitas penyuluh pertanian/perkebunan	Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	15,0
----	---	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan indikator kinerja sasaran dengan Formulasi perhitungan sebagai berikut :

I. NON URUSAN

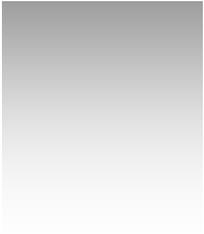
- a. Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
 - Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
Formulasi perhitungan : jumlah pelayanan administrasi yang terlaksana dibagi dengan jumlah seluruh pelayanan administrasi di kali seratus
- b. Tercukupinya sarana dan prasarana kerja aparatur
 - Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Formulasi perhitungan : jumlah kegiatan sarana prasarana tahun berkenaan dibagi dengan jumlah kegiatan sarana dan prasarana kerja aparatur dikali seratus
- c. Terwujudnya peningkatan kualitas dan disiplin aparatur
 - Persentase tingkat kehadiran ASN
Formulasi perhitungan : Jumlah kehadiran pegawai tahun berkenaan dibagi dengan jumlah seluruh pegawai di kali seratus

II. URUSAN

1. Terwujudnya peningkatan produksi Perkebunan
Produksi Komoditas Utama tanaman perkebunan
Formulasi perhitungan : Jumlah produksi komoditas utama tanaman perkebunan (data statistik tanaman perkebunan)

Produktivitas Komoditas Utama perkebunan,
Formulasi perhitungan : Jumlah produksi komoditas tanaman perkebunan tahun berkenaan (kg) dibagi dengan luas lahan produktif (TM) di kali seratus
2. Terwujudnya peningkatan kapasitas penyuluh pertanian/perkebunan
Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya
Formulasi perhitungan : Jumlah SDM petani dan aparaturnya yang ditingkatkan kompetensinya di bagi dengan jumlah petani / kelompok tani yang terdaftar dalam Simluhtan dikali seratus

Faktor pendukung keberhasilan pembangunan tanaman perkebunan di Provinsi Riau adalah sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan dukungan anggaran pembangunan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Riau sangat mendukung terhadap pengembangan pembangunan tanaman Perkebunan. Akan tetapi potensi tersebut akan memberikan dampak yang optimal apabila dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik. Untuk itu sangat diperlukan program dan kegiatan yang mampu meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan pelaku pembangunan tanaman perkebunan. Pendanaan untuk mencapai sasaran tersebut berasal dari APBD Provinsi Riau, dengan alokasi dana indikatif untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung selama periode 2019 - 2024 disajikan pada Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagaimana disajikan pada Tabel 6.2. (Tabel T-C.27. Permendagri No. 86 Tahun 2017) sebagai berikut :



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Renstra Perangkat Daerah Dinas Tanaman Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD (Tabel 7.1).

Tabel 7.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan

Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
Nilai Tukar Usaha Perkebunan	98,54	99,55	100,10	100,60	102,10	102,60	102,60

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Provinsi Riau dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 serta isu-isu bidang Tanaman Perkebunan yang harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020-2024 ini telah memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya tujuan dan sasaran dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk jangka waktu 2020-2024. Untuk selanjutnya Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020-2024 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2020-2024, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada akhirnya diharapkan dengan Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2020-2024 ini dapat mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk tahun 2020-2024, dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Provinsi Riau Tahun 2020-2024 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Tabel 6.2.
Tabel.T-C.27 Permendagri No. 86 Tahun 2017
 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
 Dinas Perkebunan

Tujuan	Sasaran	Kode Program / Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
					Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Jumlah 2020 s.d. 2024)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2.0.03.03.0.0.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen		3.008.811.700,00	100 Persen	3.125.200.000,00	100 Persen	3.343.570.000,00	100 Persen	3.594.350.000,00	100 Persen	3.852.710.000,00	100 Persen	16.924.641.700,00	
Meningkatkan kinerja OPD	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	2.0.03.03.0.0.00.01.001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	- Surat	-	1.051	15.750.000,00	1.051	15.000.000,00	1.051	15.000.000,00	1.051	17.500.000,00	1.051	17.500.000,00	4.216	80.750.000,00	
		2.0.03.03.0.0.00.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	- Rekening	-	12	428.750.000,00	12	428.750.000,00	12	450.000.000,00	12	450.000.000,00	12	450.000.000,00	52	2.207.500.000,00	
		2.0.03.03.0.0.00.01.003.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	- Unit	-	4	15.600.000,00	4	15.000.000,00	4	178.058.300,00	4	378.588.300,00	4	636.948.300,00	28	1.224.194.900,00	
		2.0.03.03.0.0.00.01.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	- Bulan	-	12	248.455.000,00	12	248.455.000,00	12	248.455.000,00	12	248.455.000,00	12	248.455.000,00	85	1.242.275.000,00	
		2.0.03.03.0.0.00.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	- Unit	-	37	65.000.000,00	37	35.000.000,00	37	65.000.000,00	37	65.000.000,00	37	65.000.000,00	183	295.000.000,00	
		2.0.03.03.0.0.00.01.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	- Jenis	-	35	250.000.000,00	35	245.938.300,00	35	250.000.000,00	35	250.000.000,00	35	250.000.000,00	190	1.245.938.300,00	
		2.0.03.03.0.0.00.01.008.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan diandaan	- Jenis	-	50	62.370.500,00	50	62.370.500,00	50	62.370.500,00	50	62.370.500,00	50	62.370.500,00	208	311.852.500,00	
		2.0.03.03.0.0.00.01.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	- Jenis	-	8	17.400.000,00	8	17.400.000,00	8	17.400.000,00	8	17.400.000,00	8	17.400.000,00	5.702	87.000.000,00	
		2.0.03.03.0.0.00.01.010.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	- Porsi	-	5.670	87.500.000,00	5.670	87.500.000,00	5.670	87.500.000,00	5.670	87.500.000,00	5.670	87.500.000,00	23.090	437.500.000,00	
		2.0.03.03.0.0.00.01.011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	- Kali	-	410	502.250.000,00	410	502.250.000,00	410	502.250.000,00	410	550.000.000,00	410	550.000.000,00	1.695	2.606.750.000,00	
		2.0.03.03.0.0.00.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	- OB	-	55	1.101.726.200,00	55	1.253.526.200,00	55	1.253.526.200,00	55	1.253.526.200,00	55	1.253.526.200,00	226	6.115.831.000,00	
		2.0.03.03.0.0.00.01.013.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	- OB	-	6	179.010.000,00	6	179.010.000,00	6	179.010.000,00	6	179.010.000,00	6	179.010.000,00	25	895.050.000,00	
		2.0.03.03.0.0.00.01.037.	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Persen	-	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	5	175.000.000,00	
		2.0.03.03.0.0.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100 Persen	100 Persen	201.860.000,00	100 Persen	163.020.000,00	100 Persen	177.670.000,00	100 Persen	194.500.000,00	100 Persen	211.830.000,00	100 Persen	948.880.000,00		
Meningkatkan kinerja OPD	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	2.0.03.03.0.0.00.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	- Unit	-	3	21.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	21.000.000,00	21	87.000.000,00	
		2.0.03.03.0.0.00.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	- Unit	-	9	18.000.000,00	9	63.020.000,00	9	63.020.000,00	9	70.000.000,00	9	20.000.000,00	38	234.040.000,00	
		2.0.03.03.0.0.00.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	- Ruang	-	2	87.500.000,00	2	50.000.000,00	2	64.650.000,00	2	64.650.000,00	2	95.070.000,00	10	361.870.000,00	
		2.0.03.03.0.0.00.02.013.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	- Unit	-	2	25.760.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	24.850.000,00	2	25.760.000,00	16	106.370.000,00	
		2.0.03.03.0.0.00.02.014.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	- Unit	-	8	49.600.000,00	8	20.000.000,00	8	20.000.000,00	8	20.000.000,00	8	50.000.000,00	32	159.600.000,00	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kehadiran ASN	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	100.000.000,00	100 Persen	400.000.000,00								
Meningkatkan kinerja OPD	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel		Pengadaan Pakaiannya khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaiannya harian hari-hari tertentu yang diadakan	178 Stel	-	0,00	100	100.000.000,00	178	100.000.000,00	178	100.000.000,00	178	100.000.000,00	634	400.000.000,00		
		2.0.03.03.2.0.03.17.	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan				5.874.736.075,00		6.199.610.000,00		6.625.970.000,00		7.115.640.000,00		7.620.080.000,00		33.436.036.075,00		
				Produksi kelapa sawit			7.918.313,20		8.071.651,60		8.224.990,00		8.378.328,00		8.531.666,80		8.531.666,80		
				Produksi kelapa			389.457,00		391.457,00		393.457,00		395.457,00		397.457,00		397.457,00		
				Produksi karet			377.618,50		384.855,00		392.091,50		399.328,00		406.564,50		406.564,50		
				Produktivitas tanaman perkebunan (kelapa sawit /CPO)			4,02		4,08		4,14		4,20		4,26		4,26		
				Produktivitas tanaman perkebunan (kelapa)			2.649,00		2.662,00		2.676,00		2.689,00		2.703,00		2.703,00		
				Produktivitas tanaman perkebunan (Karet)			1.236,00		1.239,00		1.242,00		1.259,00		1.271,00		1.271,00		
				Produktivitas tanaman perkebunan (sagu)			7.609,00		7.690,00		7.809,00		7.903,00		8.003,00		8.003,00		
Meningkatkannya	Meningkatnya produksi	2.0.03.03.2.0.03.17.001.	Peningkatan Akses kemitraan petani Kelapa	Jumlah kelompok tani yg ditingkatkan akses kemitraan	- Kelompok	-	15	87.446.000,00	15	87.446.000,00	15	92.692.760,00	15	98.254.325,60	15	104.149.585,14	210	469.988.670,74	
		2.0.03.03.2.0.03.17.002.	Pembangunan Kebun Sagu Rakyat	Luas Kebun Sagu	- Ha	-	150	506.846.000,00	150	506.846.000,00	150	537.256.760,00	150	569.492.165,60	150	603.661.695,54	1.700	2.724.102.621,14	

Tujuan	Sasaran	Kode Program / Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
					Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Jumlah 2020 s.d. 2024)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
pendapa tan petani melalui peningkat tan NTUP		2.0.03.03.2.0.03.17.003.	Diversifikasi Tanaman Perkebunan Rakyat	Jumlah Tanaman Perkebunan yang ditanam	- Batang	-	1.100	370.766.000,00	1.100	370.766.000,00	1.100	393.011.960,00	1.100	416.592.677,60	1.100	441.588.238,26	24.400	1.992.724.875,86
		2.0.03.03.2.0.03.17.004.	Pembinaan dan Pengawasan Program Pembilayaan Usaha Perkebunan Untuk Program Peremajaan	Luas lahan yang diremajakan (Ha)	- Ha	-	20.000	125.000.000,00	20.000	125.000.000,00	20.000	132.500.000,00	20.000	140.450.000,00	20.000	183.978.600,00	80.007	706.928.600,00
		2.0.03.03.2.0.03.17.005.	Peningkatan Mutu Hasil Produk Perkebunan	Jumlah kelompok tani pengolahan hasil yang dibina	Kelompok		7	283.386.000,00	6	283.386.000,00	7	300.389.160,00	8	318.412.509,60	9	337.517.260,18	40.030	1.523.090.929,78
		2.0.03.03.2.0.03.17.006.	Pengawasan dan sertifikasi benih Perkebunan	Jumlah Benih yang diawasi dan disertifikasi	Label		40.000	36.310.000,00	40.000	36.310.000,00	40.000	92.872.000,00	40.000	98.444.320,00	40.000	104.350.979,20	160.200	368.287.299,20
		2.0.03.03.2.0.03.17.007.	Intensifikasi Tanaman perkebunan	Luas tanaman yang dipelihara	Ha		200	623.700.000,00	200	623.700.000,00	200	661.122.000,00	200	700.789.320,00	200	742.836.679,20	810	3.352.147.999,20
		2.0.03.03.2.0.03.17.008.	Penumbuhan dan pengembangan Penangkar Bibit/Benih perkebunan	Jumlah Penangkar Benih yang di tumbuhkan	Penangkar		10	80.476.000,00	10	80.476.000,00	10	85.304.560,00	10	150.000.000,00	10	159.000.000,00	25.040	555.256.560,00
		2.0.03.03.2.0.03.17.009.	Pengembangan Perbenihan Perkebunan	Jumlah bibit yang dihasilkan	- Bibit	-	25.000	764.478.000,00	10.000	364.478.000,00	10.650	410.346.680,00	10.650	434.967.480,80	10.650	461.065.529,65	42.950	2.435.335.690,45
		2.0.03.03.2.0.03.17.010.	Pengendalian OPT Perkebunan	luas lahan yang dikendalikan	- Ha	-	1.000	100.000.000,00	1.000	100.000.000,00	1.000	106.000.000,00	1.000	112.360.000,00	1.000	119.101.600,00	4.007	537.461.600,00
		2.0.03.03.2.0.03.17.011.	Normalisasi Saluran Drainase pada Areal Perkebunan Rakyat	Panjang normalisasi saluran drainase	Km		7	723.200.000,00	7	723.200.000,00	7	766.592.000,00	7	812.587.520,00	7	861.342.771,20	36	3.886.922.291,20
		2.0.03.03.2.0.03.17.012.	Pembangunan Water Management pada Kawasan Perkebunan Rakyat	Jumlah sekat kanal yang dibangun	Sekat		8	666.200.000,00	8	666.200.000,00	8	706.172.000,00	8	748.542.320,00	8	793.454.859,20	38	3.580.569.179,20
		2.0.03.03.2.0.03.17.013.	Pembinaan dan pengadaan alat pasca panen dan pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah alat pengolahan hasil produk perkebunan	Unit		6	199.216.000,00	6	199.216.000,00	6	211.168.960,00	6	259.076.416,21	6	274.621.001,18	109	1.143.298.377,39
		2.0.03.03.2.0.03.17.014.	Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat	Luasan Kebun Kelapa Rakyat yang diremajakan	Ha		85	1.307.712.075,00	50	932.586.000,00	50	980.541.160,00	85	1.039.373.629,60	85	1.101.736.047,38	270	5.361.948.911,98
			Pengadaan alat mekanisasi Perkebunan	Jumlah alat mekanisasi perkebunan	Unit		-	0,00	1	600.000.000,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00	4	2.550.000.000,00
			Pembinaan dan Pengawasan Penataan izin usaha perkebunan	Jumlah izin perusahaan yang diterbitkan	Perusahaan		-	0,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	142.297.314,99	5	232.235.153,89	20	574.532.468,88
		Peremajaan Kebun Karet Rakyat	Luas kebun karet	Ha		-	0,00	50	400.000.000,00	50	400.000.000,00	50	424.000.000,00	50	449.440.000,00	200	1.673.440.000,00	
		2.0.03.03.2.0.03.18.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan Perkebunan	Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya		3%	209.810.000,00	3%	221.410.000,00	3%	236.640.000,00	3%	254.130.000,00	3%	272.140.000,00		1.194.130.000,00	
Meningk atnya pendapa tan petani melalui peningkat an	Meningkatnya produksi	2.0.03.03.2.0.03.18.001.	Pelatihan Petani dan Petugas perkebunan	Jumlah petani dan petugas yang terlatih	- Orang	-	150	49.071.025,00	150	51.524.576,25	150	55.131.296,59	150	58.990.487,35	150	63.119.821,46	670	277.837.206,65
		2.0.03.03.2.0.03.18.002.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan penyuluhan perkebunan	Jumlah kelembagaan penyuluhan yang dibina dan dinilai	Lembaga	-	70	43.436.975,00	70	46.718.323,75	70	49.719.906,41	70	54.125.499,86	70	58.135.184,85	315	252.135.889,88
		2.0.03.03.2.0.03.18.003.	Pekan Nasional KTNA Perkebunan	Jumlah penyuluh KTNA provinsi dan petani yang mengikuti Pekan Nasional	- Orang	-	35	117.302.000,00	35	123.167.100,00	35	131.788.797,00	35	141.014.012,79	35	150.884.993,69	140	664.156.903,48
JUMLAH (Rupiah)							9.295.217.775,00		9.809.240.000,00		10.483.850.000,00		11.258.620.000,00		12.056.760.000,00		52.903.687.775,00	

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
21	22
DISBUN	Pekanbaru
DISBUN	Pekanbaru
DISBUN	Pekanbaru
DISBUN	Pekanbaru
DISBUN	Pekanbaru

Pagu tidak sesuai dengan RPJMD Tahun 2020 sebesar Rp. 26.046.894.393,00

